

PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) CITRA DHARMA MULYA SEBAGAI BASIS EKONOMI MASLAHAH DI DESA TRIMULYO JETIS BANTUL

Trisna Wulandari

Puji Solikhah

Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta, Indonesia

Email: trisnaw750@gmail.com, pujisolikhah@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the normative, ideal, and factual roles of BKM Citra Dharma Mulya as the masalah economic base for problems in Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta. This study is a qualitative field research with case study. The data collection techniques include primary data, namely observation, interviews, and documentation. While secondary data, namely the collection of books, articles, journals, documentation files, and library materials related to study. The study results showed that: (1) the ideal role of BKM in accordance with the guidelines for implementing PNPM Mandiri Urban, among others: mobilizing citizens in a participatory manner to formulate plans for poverty problems, generating various empowerment activities for the poor, and so on. (2) The normative role of BKM Citra Dharma Mulya as a masalah economic base includes: work planning for BKM Citra Dharma Mulya, Secretarial Work Program, special program for BKM Citra Dharma Mulya, and UPK, UPL, and UPS Work Programs. (3) The factual roles of BKM Citra Dharma Mulya include: organizing the community in a participatory manner through decision-making councils, upholding noble values, fostering various empowerment activities, and supervising the BLM implementation process.

Keywords : Role, Community Welfare Agency, Masalah Economics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran normatif, ideal, dan faktual BKM Citra Dharma Mulya sebagai basis ekonomi masalah bagi permasalahan di Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi data primer yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yaitu kumpulan buku, artikel, jurnal, file dokumentasi, dan bahan pustaka yang berhubungan dengan studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran ideal BKM sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan antara lain: menggerakkan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana penanggulangan kemiskinan, melahirkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin, dan segera. (2) Peran normatif BKM Citra Dharma Mulya sebagai basis ekonomi masalah meliputi: perencanaan kerja BKM Citra Dharma Mulya, Program Kerja Kesekretariatan, program khusus BKM Citra Dharma Mulya, dan Program Kerja UPK, UPL, dan UPS. (3) Peran faktual BKM Citra Dharma Mulya antara lain: mengorganisir masyarakat secara partisipatif melalui dewan pengambil keputusan, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, membina berbagai kegiatan pemberdayaan, dan mengawasi proses pelaksanaan BLM.

Kata kunci: Peran, Badan Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi Masalah.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang terjadi hampir diseluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan selalu menjadi momok bagi pemerintah di setiap negara di dunia dan harus dihadapi. Alasannya adalah bahwa tingkat kemiskinan yang ada pada suatu negara menjadi salah satu penentu suatu negara dapat dikatakan maju, berkembang, ataupun tertinggal. Kemiskinan menggambarkan perihal tidak adanya kepemilikan dan rendahnya penghasilan dan pendapatan seseorang, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi dimana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Bhinadi, 2017: 9). Fenomena kemiskinan di Indonesia dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu, kelompok dan keluarga untuk memenuhi standar hidup minimum (Rustanto, 2015:2).

Dalam konteks penjelasan pandangan Al-Quran tentang kemiskinan, ditemukan beberapa ayat yang memuji terkait kecukupan, bahkan Al-Quran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Hal ini sebagaimana dalam QS Al-Jum'ah 62/10, Allah SWT befirman: *“apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”*

Tidak ada di dunia ini yang diciptakan Tuhan sebagai mahluk yang miskin. Tuhan menjamin rizki bagi semua mahluknya,sejatinya yang membuat miskin adalah dirinya sendiri yaitu dengan berdiam diri dan tidak memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah dimiliki. Manusia diciptakan dengan anggota tubuh untuk dipergunakan dengan sebaik mungkin, mencari karuniaNya di siang hari dan beribadah kepada-Nya di malam hari. Beberapa ayat Al-Quran menunjukkan bahwa rizki yang diberikan Tuhan itu harus dicari (*wabtaghi*) bukan datang dengan sendirinya.

Di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mewabah saat ini, banyak negara, termasuk Indonesia, telah lumpuh perekonomiannya sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan masyarakatnya. Banyak masyarakat saat ini yang kehilangan pekerjaan hingga tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Dengan selaku penentu kebijakan negara pemerintah berkewajiban mencari cara penanggulangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai jalan peningkatkan efektifitas penekanan angka kemiskinan, pemerintah mempunyai konsep penanggulangan kemiskinan dengan basis pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat menjadi subjek bukan sebagai objek dalam penanggulangan kemiskinan. Upaya pembangunan ekonomi dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan pada tahun 1990-an. Saat itu pemerintah memperkenalkan paradigma baru yang lebih menekankan pada pengoptimalan sumber daya manusia (SDM) (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007:89). Dalam konsep pemberdayaan masyarakat faktor partisipasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan (Taufik, 2015:193). Salah satu cara yang

dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah dengan memperluas dan memperbaiki jangkauan program pembangunan berbasis masyarakat seperti program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah dan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

KOTAKU merupakan program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan. KOTAKU merupakan sebuah upaya strategis dari Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak (<https://kotaku.pu.go.id>). Program KOTAKU mencakup beberapa bidang yaitu, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang lingkungan. Dalam bidang ekonomi, terdapat program yang disebut dengan pinjaman bergulir dimana pinjaman ini berasal dari dana pemerintah dan kemudian digulirkan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dalam bentuk pinjaman yang kemudian pengembaliannya dengan cara angsuran.

Dalam konteks KOTAKU, pinjaman ekonomi bergulir adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bertindak mengawasi kegiatan dan memberikan Modal kepada warga miskin, pinjaman ekonomi bergulir ini juga didampingi dan difasilitasi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Tujuan dari kegiatan pinjaman bergulir ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin melalui pinjaman mikro yang berbasis pasar dengan kegiatan yang dapat menghasilkan sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat menuju yang lebih baik. Menyalurkan program-program pembangunan sosial ataupun pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan pendekatan partisipatif merupakan salah satu peranan dari lembaga masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang sanggup untuk mengelola, mengembangkan potensi yang dimiliki di wilayahnya.

Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran program KOTAKU. Dalam pelaksanaannya, dibentuk suatu badan yang bertugas memfasilitasi partisipasi masyarakat sehingga dalam program ini diharapkan masyarakat miskin dapat berpartisipasi aktif dengan membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat. BKM merupakan lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban dengan kedudukan sebagai pimpinan

kolektif ditingkat desa atau kelurahan. Peran BKM sebagai lembaga kemasyarakatan adalah menyalurkan program-program pembangunan atau pemberdayaan masyarakat kepada yang membutuhkan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dari masyarakat. Secara khusus, BKM ini ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan secara umum BKM ini ditujukan untuk pembangunan masyarakat desa/kelurahan.

BKM Citra Dharma Mulya bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat di Desa Trimulyo. Sebagai fasilitator BKM mengarahkan dan juga melibatkan masyarakat secara langsung untuk berpartisipasi membangun daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai evaluasi pembangunan dengan harapan masyarakat akan memiliki tanggung jawab tinggi pada daerah tempat tinggalnya, dan apabila daerahnya mengalami kerusakan, maka masyarakat akan langsung memperbaiki tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah. Dan dengan adanya BKM masyarakat menjadi lebih terbantu dengan adanya program-program yang dibawa oleh BKM, seperti program ekonomi bergulir yang dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dibidang ekonomi. Masyarakat desa Trimulyo cukup terbantu dengan adanya bantuan ekonomi bergulir ini. program ekonomi bergulir ini ditujukan kepada masyarakat desa Trimulyo yang ingin membuka usaha atau pun untuk meminjam modal.

Adanya BKM ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat berkembang sebagai pusat penggerak tumbuhnya kesadaran kritis dari masyarakat dan kebutuhan bersinergi masyarakat untuk mengorganisir diri dan menggali berbagai potensi yang ada, agar masyarakat mampu mengatasi permasalahan secara mandiri sesuai dengan yang ada dan dicantumkan di dalam anggaran dasar. Dengan adanya BKM Citra Dharma Mulya dapat dijadikan sebagai suatu langkah awal bagi masyarakat di Desa Trimulyo, Jetis, Bantul untuk membuka lapangan kerja dan mampu mengangkat taraf hidup bagi masyarakat miskin dengan berbagai program-program yang diberikan. Maka dari itu, penelitian ini mengungkap bagaimana peran normatif, ideal, dan faktual BKM Citra Dharma Mulya sebagai basis ekonomi masalah di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Karakteristik dari penelitian deskriptif kualitatif adalah menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode pengamatan, wawancara, atau dokumen, menganalisis data secara induktif, menganalisis data secara induktif, menganalisis data secara

deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria sendiri untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara dan hasil penelitian dirundingkan serta disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.

Lokasi penelitian ditentukan bertujuan agar mendapatkan data terkait dengan masalah penelitian serta memperjelas masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, wilayah Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi objek penelitian yang akan dilakukan peneliti. Data Penelitian merupakan informasi yang terdapat pada segala sesuatu apapun yang menjadi sasaran penelitian. Melalui berbagai sumber data, seperti dokumen, narasumber (*informant*), peristiwa atau aktifitas dan tempat, dimana data penelitian dapat digali dan dikumpulkan (Nugrahani, 2004:211). Sumber data dalam penelitian ini mencakup 2 sumber data, yaitu (1) sumber data primer, suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, wawancara, ataupun observasi. (2) Sumber data sekunder, yakni data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain seperti buku, dokumen, foto, dan statistik merupakan pengertian dari sumber data sekunder. Fungsi sumber data sekunder adalah sebagai sumber data pelengkap (Hardani, 2020:247).

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi: (1) observasi, yakni pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Arikunto, 2006: 230). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi. (2) wawancara, yakni salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi antara dua orang atau lebih (Suyitno, 2018:113-114). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin di mana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. (3) dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal yang atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

Analisis data dalam penelitian ini adalah sesuai dengan analisis Miles dan Huberman, yakni: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi (Arikunto, 2006: 175). Sedangkan teknis keabsahan data menggunakan standar kredibilitas dengan cara Triangulasi. Triangulasi sendiri memiliki tiga model triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yakni (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi teknik, dan (3) triangulasi waktu.

Triangulasi ini merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber (Sugiyono, 2020:125).

HASIL

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Basis Ekonomi Masalah

Peran adalah suatu ikatan yang terstruktur yang timbul karena adanya suatu jabatan tertentu. Peranan merupakan bagian dinamis kedudukan (*status*), seseorang dapat melakukan peranan apabila seseorang tersebut melakukan hak dan juga kewajiban sesuai dengan kedudukan seseorang tersebut. Peran memiliki beberapa jenis di antaranya: 1) Peran normatif yaitu peran yang dilakukan oleh lembaga ataupun seseorang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 2) Peran ideal yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga berdasarkan pada nilai ideal atau berkedudukan dalam suatu sistem. 3) Peran faktual yaitu peran yang berdasarkan pada kenyataan secara kongkrit di kehidupan sosial yang terjadi secara nyata (Soekanto, 2012: 212).

BKM Citra Dhara Mulya merupakan salah satu lembaga yang ada di kelurahan Trimulyo. Dalam hal ini BKM memiliki peranan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan Trimulyo, dengan menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat.

BKM merupakan lembaga pimpinan kolektif suatu masyarakat desa yang mempunyai fungsi mengendalikan dan juga mengemudikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya BKM mempunyai beberapa peran penting, seperti: 1) Mengorganisasikan warga secara partisipatif, 2) Dewan Pengambilan Keputusan, 3) Menegakkan nilai-nilai luhur, 4) Pemberdayaan masyarakat miskin, dan 5) Mengawasi proses pelaksanaan BLM.

Secara umum pemberdayaan adalah satu pihak memberikan kekuasaan atau wewenang, atau memberi kemampuan kepada pihak lain sehingga pihak lain tersebut menjadi berdaya (Fatih, 2010:23). Pada dasarnya pemberdayaan adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, pengembangan dan kemandirian agar dapat berbuat lebih baik terhadap lingkungan demi keadaan yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat harus berpusat pada masyarakat, karena itulah masyarakat mempunyai peranan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Wilson mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam sebuah organisasi merupakan sebuah siklus kegiatan yang terdiri dari:

- a) Titik awal perlunya pemberdayaan adalah keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki. Tanpa adanya keinginan untuk melakukan perubahan dan memperbaiki, maka pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian dan juga partisipasi dari masyarakat.
- b) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk kemudian mengikuti pemberdayaan demi mewujudkan perbaikan dan perubahan yang diharapkan.
- c) Membangun kesadaran untuk mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat guna memperbaiki keadaan.
- d) Peningkatan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang manfaatnya telah dirasakan
- e) Peningkatan peran dan partisipasi kegiatan pemberdayaan, yang dibuktikan dengan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan
- f) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan
- g) Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui pemberdayaan baru (Mardikanto & Soebianto, 2017: 122-123).

Sebagai sebuah proses perubahan, pemberdayaan memiliki konsep. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan tergantung pada dua hal yaitu:

- a) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Apabila kekuasaan tidak dapat berubah, maka pemberdayaan tidak akan terjadi.
- b) Bahwa kekuasaan dapat dipeluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam komunitas formal maupun komunitas non formal untuk melakukan tinjauan masalah, menyusun, dan melakukan penilaian terhadap program yang telah direncanakan bersama (Widjajanti, 2011:18). Tingkat dan jumlah keterlibatan masyarakat dari kegiatan-kegiatan kajian atau tinjauan masalah, penyusunan program, pelaksanaan program, serta keterlibatan dalam penilaian secara berkelanjutan menjadi standar dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok kecil yang memiliki ketidakmampuan, baik karena kondisi internal maupun eksternal merupakan tujuan utama dari adanya pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2009:60). Beberapa tujuan lain dari adanya pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dengan menggunakan cara penanganan yang terpadu.
- b) Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
- c) Meningkatkan *skill* yang ada pada masyarakat dalam usaha yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat, faktor peningkatan kualitas dari sumber daya manusia perlu mendapat prioritas. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat akan menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan mampu berinovasi serta memiliki pola pikir yang luas taraf hidup dan juga kesejahteraannya dapat meningkat.

Adapun strategi pemberdayaan masyarakat (*community development*) bertujuan mendorong masyarakat miskin untuk secara kolektif ikut serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk penanggulangan kemiskinan yang sedang dihadapi (Bahri, 2014:35). Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan beberapa strategi sebagai berikut:

- a) Menyusun instrumen pengumpulan data. Hasil penelitian terdahulu, referensi yang tersedia, hasil temuan pengamatan lapangan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam kegiatan ini.
- b) Membangun komitmen dan juga pemahaman untuk mendorong kemandirian masyarakat, keluarga, dan juga individu
- c) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem, intervensi, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan yang dilakukan.

Demi mencapai keberhasilan memberdayakan masyarakat, terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan oleh para inisiator. Adapun upaya yang harus dilakukan terdiri atas tiga konsep yaitu:

- a) *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak di sini adalah pemahaman bahwa setiap masyarakat pasti memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Artinya tidak ada seseorang ataupun masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan merupakan upaya guna membangun daya tersebut dengan membangkitkan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkan potensi tersebut.
- b) *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang ada di masyarakat. Diperlukan langkah-langkah yang nyata yang menyangkut dengan penyediaan berbagai masukan (*input*) dan pembukaan dalam berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam pemberdayaan ini adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan, taraf ekonomi, dan juga akses ke sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti teknologi, informasi lapangan kerja, pasar, termasuk juga pembangunan sarana dan juga prasarana dasar

yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang berada dibawah yang kurang dalam hal keberdayaan.

- c) *Protecting* yaitu perlindungan serta pemihakan kepada yang lemah untuk pencegahan yang lemah menjadi tambah lemah karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Perlindungan atau melindungi dalam hal ini dapat diartikan sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan juga eksploitasi yang kuat kepada yang lemah. Pemberdayaan masyarakat tidak untuk membuat masyarakat smenjadi semakin tergantung dengan program-program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya tujuan ahir dari pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk memandirikan masyarakat dan juga untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik.

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah bentuk pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan dari bawah, atau biasa dikenal dengan pendekatan partisipatif (Bahri, 2014:25). Salah satu indikator yang penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasinya. Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses dan juga tujuan dalam menjapai tujuan dari pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan sebuah strategi yang potensial dalam rangka untuk peningkatan ekonomi, sosial, dan juga transformasi budaya. Partisipasi masyarakat dapat menjadi sebuah sarana yang cukup efektif untuk menjangkau masyarakat miskin melalui upaya pembangkitan semangat agar dapat menolong diri sendiri.

Peran Normatif BKM Citra Dharma Mulya Sebagai Basis Ekonomi Masalah

BKM Citra Dharma Mulya selama ini telah melakukan berbagai kegiatan sebagai wujud kedaulatan warga dalam rangka melakukan perbaikan sebagai amanah oleh warga dalam mengelola kegiatan pembangunan, khususnya pengelolaan penataan kawasan permukiman. Salah satu kegiatan yang menarik untuk dilihat adalah Rembug Warga Tahunan (RWT). Kegiatan ini merupakan sarana dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas BKM Citra Dharma Mulya (Maksum, 2020).

Kegiatan demi kegiatan yang telah dijalankan oleh BKM Citra Dharma Mulya selalu mendasarkan pada peran normatif yang selama ini dijadikan pedoman di setiap kegiatan, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dijalankan. Adapun peran normatif BKM Citra Dharma Mulya sebagai basis ekonomi masalah di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul adalah:

- A. Perencanaan Kerja BKM Citra Dharma Mulya

Dalam perencanaan kerja, BKM Citra Dharma Mulya telah memiliki beberapa rencana, di antaranya adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan serta aturan secara demokratis dan partisipatif, terutama dalam bidang penggunaan BLM “KOTAKU” Program Kotaku;
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang visi, misi, rencana strategis, dan rencana program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis);
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM terutama dana BLM kemiskinan “KOTAKU” di wilayah Desa Trimulyo;
4. Membangun transparansi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan secara triwulan;
5. Membangun kepercayaan masyarakat dengan mengaudit internal melalui auditor eksternal/independen yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat;
6. Meningkatkan kegiatan BKM yang mencakup kegiatan ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan;
7. Mengadakan rapat rutin, rapat insidental, rapat khusus, dan rembuk warga tahunan;
8. Mengawasi jalannya UPK, UPL, UPS dan kesekretariatan secara berkala dan meminta laporan perkembangan kegiatan secara periodik;
9. Mengadakan pembinaan kepada UPK, UPL, UPS, dan Sekretariat;
10. Mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan;
11. Mendorong terbentuknya KSM-KSM di tingkat pedukuhan maupun di tingkat desa dalam menyalurkan dana BLM “KOTAKU” dan program lainnya (baik dari pemerintah pusat/daerah, badan donor, perguruan tinggi, swasta, dan seterusnya);
12. Membentuk tim review kebadanan, keuangan dan program (PJM Pronangkis) setiap tahun yang melibatkan unsur BKM, Pemerintah Desa, LMPD, dan masyarakat;
13. Membina KSM-KSM yang bermasalah;
14. Melaksanakan program lainnya yang diputuskan dalam rapat pleno BKM (Dokumentasi Kotaku, 2019).

B. Program Kerja Kesekretariatan

Adapun peran normatif dari program kerja kesekretariatan dapat dilihat dari uraian berikut, antara lain:

1. Membenahi administrasi BKM;
2. Menyusun agenda rapat dan pertemuan BKM
3. Membuat dan menyebarkan undangan;
4. Membuat daftar hadir dan berita acara rapat BKM;

5. Mencatat administrasi keuangan operasional BKM dan instansi terkait;
6. Mencatat kegiatan BKM yang berdasarkan pada laporan unit pengelola;
7. Mencatat kegiatan surat menyurat dan pengarsipan (Dokumentasi Kotaku, 2019).

C. Program Khusus BKM Citra Dharma Mulya

BKM Citra Dharma Mulya juga memiliki peran normatif melalui berbagai program khusus, di antaranya adalah:

1. Mengadakan pelatihan pengurus BKM dan unit pengelola sesuai dengan spesialisasi tugas masing-masing;
2. Menginventarisasi kegiatan unggulan BKM agar dapat dipromosikan;
3. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain;
4. Singkronisasi segala program kegiatan yang dilakukan oleh BKM dengan program Pemerintah Daerah;
5. Ikut berperan aktif dalam kegiatan Musrenbang yang diadakan oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Kabupaten;
6. Mendorong pemerintah desa melaksanakan Program KOTAKU;
7. Melaksanakan monitoring program-program KSM (Dokumentasi Kotaku, 2019).

D. Program Kerja UPK, Program Kerja UPL, dan Program Kerja UPS

1. Program Kerja UPK

Peran normatif BKM Citra Dharma Mulya dalam konteks Program Kerja UPK dapat diuraikan sebagaimana berikut:

- a. Mengikuti rapat dengan BKM;
- b. Mengadakan rapat internal UPK dengan BKM dalam membahas kegiatan pinjaman bergulir dan evaluasi kegiatan KSM;
- c. Melaksanakan pinjam bergulir bagi KSM-KSM Ekonomi Produktif;
- d. Melaksanakan penerimaan angsuran setiap hari Minggu;
- e. Mengadakan pembinaan bagi KSM UPK yang bermasalah;
- f. Mengikuti pelatihan UPK tingkat Kabupaten Bantul;
- g. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

2. Program Kerja UPL

Tidak hanya UPK, BKM Citra Dharma Mulya juga memiliki peran normatif terkait Program Kerja UPL, di antaranya adalah:

- a. Mengikuti rapat dengan BKM;
- b. Mengadakan rapat internal UPL dengan BKM membahas kegiatan lingkungan dan evaluasi kegiatan KSM;
- c. Mengadakan pembinaan bagi KSM-KSM UPL;
- d. Mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan;
- e. Mengadakan kerja sama dengan pihak lainnya.

3. Program Kerja UPS

Program selanjutnya yang dilakukan oleh BKM Citra Dharma Mulya dalam konteks peran normatif adalah:

- a. Mengikuti rapat dengan BKM;
- b. Mengadakan rapat internal UPS dengan BKM membahas kegiatan lingkungan dan evaluasi kegiatan KSM;
- c. Mengadakan berbagai macam pelatihan;
- d. Memberikan sertifikat kepada peserta dan pelatih;
- e. Mengadakan berbagai kerja sama dengan pihak lain yang terkait (Dokumentasi Kotaku, 2019).

Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2012:81) disebutkan beberapa peran BKM sebagai berikut: a) Mengerahkan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penyelesaian masalah kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM, b) Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya ditingkat komunitas masyarakat, c) Memperkenalkan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, d) Membangkitkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin, e) Memperluas jaringan Badan Keswadayaan Masyarakat, guna sebagai mitra kerja pemerintah Daerah dan sebagai wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya, f) Melakukan pengawasan terhadap proses pemanfaatan BLM, yang dikelola UPK.

PEMBAHASAN

Peran Faktual BKM Citra Dharma Sebagai Basis Ekonomi Masalah

Sebagai salah satu aset paling berharga di Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah wadah berkumpulnya individu berjiwa relawan, bijak, transparan, akuntabel, amanah dalam mengordinir penanganan kumuh, dan memiliki empati terhadap warga masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk menentukan program-program pemberdayaan yang akan direalisasikan, terlebih dahulu masyarakat mengadakan rapat ataupun rembung warga yang difasilitasi oleh BKM. Adapun beberapa peran yang dilakukan oleh BKM Citra Dharma Mulya adalah:

A. Mengorganisasikan masyarakat secara partisipatif

Perencanaan adalah serangkaian kegiatan tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam perencanaan akan didapatkan hasil berupa kegiatan ataupun program yang nantinya akan dilaksanakan, tujuan kegiatan, alat dan bahan, prosedur serta alternatif kebijakan. Perencanaan ini dilakukan oleh BKM Citra Dharma Mulya bersama-sama dengan masyarakat dan juga perwakilan dari pemerintah desa.

Skema perencanaan partisipatif yang telah dilakukan oleh BKM Citra Dharma Mulya dilakukan dari bawah dengan sistem *botton-up planing*, yang merupakan sistem perencanaan yang dilakukan dimana masyarakat sangat berperan dalam pemberian gagasan awal sampai dengan evaluasi program yang dilaksanakan, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam jalannya program. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam memberikan gagasan awal hingga pelaksanaan dan kegiatan evaluasi kegiatan. Seperti yang dijelaskan oleh koordinator bkm di bawah ini:

untuk perencanaan itu dari bawah mbak, mulai dari RK PS, seng menentukan itu masyarakat nggih, setelah ada usulan lalu dilakukan survei lokasi seperti kegiatan lingkungan, survey niki dimaksudkan untuk mengira-ngira berapa pembiayaan yang dibutuhkan untuk membangun seperti jamban, rehap rumah, dan perbaikan jalan (Maksum, 2020).

Pengorganisasian masyarakat merupakan salah satu peran dari BKM Citra mulya. Kegiatan ini dilakukan oleh BKM Citra Dharma Mulya guna merumuskan apa saja program-program yang akan dilakukan guna memberdayakan masyarakat. Seperti yang dijelaskan informan berikut: *“setiap ada musyawarah dibalai desa, semua pihak terkait diundang mbak, yang dateng lumayan kok. masyarakat di sini cukup antusias terhadap program-program BKM ini mbak”*.

Partisipasi masyarakat merupakan indikator yang penting dalam pemberdayaan masyarakat, berdasarkan keterangan dari informan-informan tersebut, dapat diketahui bahwa perencanaan kegiatan yang ada dalam program kerja Desa Trimulyo sudah melibatkan peran aktif dari masyarakat.

B. Dewan Pengambilan Keputusan

BKM sebagai dewan pengambil keputusan, merupakan salah satu fungsi BKM Citra Dharma Mulya sebagai penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan juga demokratis yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin. Peran sebagai dewan pengambil keputusan ini diberikan kepada BKM Citra Dharma Mulya karena memiliki legalitas dari masyarakat untuk memimpin dan mewakilinya. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator BKM sebagai berikut: *“BKM niku menentukan layak atau tidaknya KSM yang menerima pinjaman, proposal-proposal yang dari KSM itu diperiksa oleh BKM mbak, usahanya apa, berapa anggotanya,”* (Maksum, 2020).

Dari penjelasan informan tersebut, dapat diketahui bahwa peran yang dilakukan BKM Citra Dharma Mulya dalam hal pengambilan keputusan adalah dengan pengambilan kebijakan seperti memutuskan kegiatan mana yang akan didanai baik itu berupa kegiatan lingkungan, sosial ataupun ekonomi. Keputusan ini tidak begitu saja diambil, melainkan di dasarkan atas usulan warga dengan mempertimbangkan pertimbangan tertentu yang telah disepakati serta di dasarkan pada prinsip yang di junjung tinggi BKM Citra Dharma Mulya seperti, demokrasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui peran ini BKM Citra Dharma Mulya berusaha untuk menjaga ketepatan sasaran program sehingga tidak merugikan masyarakat nantinya. BKM Citra Dharma Mulya bertindak sebagai perencana sosial dan pengambil keputusan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Trimulyo, baik berupa kegiatan lingkungan, sosial maupun ekonomi.

Perannya itu ikut melibatkan diri pada setiap program dari KOTAKU mbak, tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Rapat rutin itu selalu ada mbak di sini. Biasanya untuk membicarakan tentang pinjaman bergulir sama program-program yang lain juga mbak. merencanakan kegiatan dari usulan-usulan masyarakat juga, banyak si Mbak (Sunarsih, 2020).

Sebelum mengambil keputusan, BKM Citra Dharma Mulya melakukan diagnosa terhadap masalah ataupun kebutuhan apa yang mendesak dan diperlukan masyarakat melalui pelaksanaan pengorganisasian masyarakat yang dikemas dalam musyawarah ataupun rapat dengan forum-forum masyarakat. Dari proses ini kemudian ditemukan berbagai gagasan dan

usulan masyarakat yang bermacam-macam. Terakhir, BKM Citra Dharma Mulya memutuskan kegiatan mana yang akhirnya akan dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi masyarakat.

C. Menegakkan Nilai-Nilai Luhur

Selain sebagai pelaksana program, BKM Citra Dharma Mulya juga berperan menegakkan nilai-nilai luhur. Peran yang dilakukan BKM di sini melaksanakan dan memberikan contoh di masyarakat melalui penerapan nilai-nilai luhur tersebut kedalam dirinya baik saat menjalankan program maupun dalam kesehariannya. Penerapan nilai-nilai luhur seperti jujur, adil, transparan dan demokratis ini dapat dengan mudah dijumpai pada penyelenggaraan perencanaan partisipatif seperti pada penentuan skala prioritas yang dikenal juga dengan nama perangkaan usulan. Kegiatan penentuan skala prioritas ini terdapat dalam kegiatan musyawarah untuk menentukan kegiatan yang bisa dilakukan KOTAKU untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam menentukan skala prioritas ini harus melihat pada beberapa aspek seperti kegiatan yang dilakukan berdampak langsung bagi masyarakat, dapat dikerjakan masyarakat, tingkat keberlanjutan kegiatan, tersedianya sumberdaya dan bermanfaat bagi masyarakat miskin. Adapun peran BKM Citra Dharma Mulya dalam hal ini adalah memfasilitasi kegiatan sebagaimana yang diungkapkan oleh Koordinator BKM :

Sebelum kegiatan itu mengundang rapat masyarakat (KSM) dulu, masyarakat mengusulkan lingkungan yang rusak, kemudian disusun mana yang perlu di prioritaskan, BKM hanya memantau, memberi arahan, membantu merengreng kerusakan, biar nanti dananya tidak dilebih-lebihkan. Usuan itu semua ya dari masyarakat. (Maksum, 2020).

Dari apa yang disampaikan oleh informan, sebelum melakukan kegiatan, BKM Citra Dharma Mulya mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan KSM untuk menentukan dan menajmin bahwa kegiatan yang akan dilakukan akan tepat sasaran dengan menggunakan skala prioritas. Untuk menentukan skala prioritas ini tiap KSM diwajibkan untuk memberikan usulan sesuai dengan hasil rapat lingkungan dengan anggotanya. Di sini BKM Citra Dharma Mulya hanya memfasilitasi dan tidak turut campur di dalamnya. Hal ini diungkapkan oleh anggota BKM:

Penyamaannya itu nanti dari masyarakat masing-masing ee kriteria disepakati secara keseluruhan, maksudnya ditingkat desa itu ada kesepakatan bahwa ini loh yang masuk kriteria. Setelah disepakati lalu diproses BKM. Misalnya untuk kegiatan ekonomi bergulir BKM melakukan pengecekan usaha yang dilakukan KSM apakah benar ada,

kurang apa nanti dibantu lagi, bagaimana usahanya. Jadi BKM memastikan agar bantuan ini tepat (Sunarsih, 2020).

Terkait dengan pendapat informan di atas, bahwa BKM Citra Dharma Mulya tidak serta merta menentukan program, setiap program diawali dari kebutuhan masyarakat yang diungkapkan dalam hasil penentuan skala prioritas. Jika diamati, dalam kegiatan penentuan skala prioritas ini BKM Citra Dharma Mulya harus memaksimalkan fungsinya dan bekerja keras seperti BKM Citra Dharma Mulya harus menghidupkan forum, mendorong masyarakat mengeluarkan masalahnya, mendorong masyarakat untuk memberikan solusi, bersikap adil, serta menjaga masyarakat untuk bersikap peduli pada lingkungan yang lebih membutuhkan. Hal ini sesuai dengan sifat kolektifitas dari BKM Citra Dharma Mulya. Kolektifitas kepemimpinan penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk menghasilkan juga mengambil keputusan yang adil dan bijaksana dan pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggungjawab, dan transparansi.

D. Menumbuhkan Berbagai Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Penanggulangan kemiskinan oleh BKM dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang dikenal dengan konsep Tridaya. Diyakini bahwa pelaksanaan pemberdayaan dengan menggunakan tiga konsep tersebut sebagian besar akan sangat ditentukan dengan lembaga masyarakat yang mampu mendorong perubahan masyarakat untuk membangun dan juga menumbuhkembangkan keberdayaan dalam ketiga bidang tersebut. Adapun lembaga masyarakat yang dimaksud di sini adalah BKM Citra Dharma Mulya.

BKM Citra Dharma Mulya menggunakan prinsip tolong menolong sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang optimal. Allah SWT berfirman :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”* (QS Al Maidah ayat 2).

Untuk mengetahui peran BKM Citra Dharma Mulya bagi pemberdayaan masyarakat di Desa Trimulyo, peneliti akan membuat analisis ketiga kegiatan tersebut.

1. Ekonomi

Kegiatan Tridaya bidang adalah kegiatan yang berwujud pemberian pinjaman bergulir. Pinjaman bergulir ini berskala mikro yang diberikan pada masyarakat miskin yang tergabung dalam KSM yang belum mendapat akses pinjaman pada lembaga keuangan. Pemberian bantuan didasarkan pada beberapa peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan BKM Citra Dharma Mulya yang pelaksanaannya tergantung masyarakat. Untuk menjalankan kegiatan ekonomi bergulir ini BKM Citra Dharma Mulya dibantu oleh UPK (Unit Pengelola Keuangan) yang pengoperasionalnya terpisah dari BKM.

Permodalan merupakan masalah yang paling utama dalam mengembangkan sebuah usaha bagi masyarakat miskin. Prosedur pinjaman dana bergulir dari BKM Citra Dharma Mulya terbilang tidak sulit, tidak seperti pencairan modal dilembaga keuangan lain yang terbilang cukup sulit seperti di pengadaian dan juga di bank. Pada lembaga tersebut dibutuhkan jamina jika ingin meminjam modal untuk usaha, jaminan seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB, Kendaraan bermotor atau yang lainnya. Selain itu pinjaman dana bergulir ini juga memiliki bunga pinjaman yang rendah yaitu 1,5%.

Kedua hal di atas yang memungkinkan bantuan modal dari program dana bergulir ini dapat diakses oleh lapisan masyarakat menengah ke bawah. Selama ini, kedua hal di atas yang menjadi kesulitan masyarakat lapisan menengah ke bawah untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan yang menerima dana pinjaman ini: *“Dulu saya minjam dari bank, tapi saiki luwih enak minjam teng BKM mbak gampang bunganenggih kecil, mboten gawe jaminan, mbak.”* (Lina, 2020).

Sebelum mengenal pinjaman bergulir, informan dan juga masyarakat trimulyo tersebut meminjam modal untuk usaha ke Bank. Setelah mengenal dana bergulir, anggota KSM tersebut lebih memilih meminjam modal melalui program dana bergulir. Informan mnegungkapkan bahwa meminjam modal usaha melalui dana bergulir lebih mudah dibandingkan meminjam modal pada lembaga-lembaga lain seperti pengadaian dan juga bank. Kehadiran pinjaman bergulir ini sangat membantu masyarakat miskin khususnya masyarakat di desa trimulyo untuk

mengakses modal usaha. Seperti yang di ungkapkan oleh informan, "sangat membangun banget mbak, persyaratane yo gak ribet, dan ora menyulitkan gitu lo mbak, jadi saya pilih minjem modal di BKM aja, mbak," (Nur, 2020).

BKM Citra Dharma Mulya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin bertugas melakukan seleksi proposal dan memantau keuangan terkait pinjaman bergulir, apakah lancar ataupun macet. ini seperti dengan apa yang di jelaskan oleh informan berikut:

Kalau di ekonomi itu misalkan ada pencairan untuk KSM selain UPK BKM juga hadir membantu disana selain itu mereka juga yang menentukan kelayakan KSM yang menerima pinjaman mbak jadi proposal-proposal dari KSM itu yang memeriksa BKM apakah kelompok ini layak diberi dana atau tidak. kalau KSM-nya macet kan otomatis nggih dana juga macet, jadi proposal itu dibuat sendiri oleh KSM dan di cek BKM (Maksum, 2020).

Berdasarkan pada penjelasan informan tersebut, peran BKM Citra Dharma Mulya dalam kegiatan ekonomi adalah mengupayakan kelancaran jalannya kegiatan ekonomi bergulir dengan cara menghubungi pihak-pihak terkait untuk mencari ttahu dan memastikan kejelasannya terkait penunggakan kelompoknya hal ini sebagai upaya kontroling dari BKM Citra Dharma Mulya.

Pengawasan proses kegiatan ekonomi dilakukan sejak penentuan kelayakan (pengecekan) usulan kegiatan/proposal yang di usulkan oleh masyarakat. Selanjutnya dilakukan pengecekan melalui data pemetaan swadaya yang juga digunakan sebagai acuan penerima bantuan. Pengawasan ini juga dilakukan dengan cara kunjungan lapangan (mendatangi calon penerima), pelaporan KSM dan juga rapat penentuan prioritas. Pengawasan ekonomi bergulir ini juga dilakukan KSM, dalam setiap KSM terdapat ketua yang mengkoordinir dana dan juga melakukan pelaporan rutin kepada BKM, biasanya pelapora ini berbentuk catatan kegiatan yang telah dilakukan kelompoknya.

2. Lingkungan

Kegiatan di bidang lingkungan yang dilakukan oleh BKM Citra Dharma Mulya berorientasi pada upaya perlindungan dan pemeliharaan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti perumahan dan pemukiman dasar yang berada di desa Trimulyo guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Trimulyo. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk merealisasikan pembangunan pemukiman yaitu sehat, layak, terjangkau, aman, teratur, dan produktif. Dalam menjalankan kegiatan ini, BKM Citra Dharma Mulya dibantu oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL). Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh BKM Citra Dharma Mulya antara lain seperti perbaikan jalan, membangun jamban/WC dan perbaikan rumah yang tidak layak huni. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan, *“Program lingkungan direalisasikan dengan melakukan pembangunan rumah dan pembuatan WC ditempat-tempat yang menjadi sasaran, terakhir kita melakukan pembangunan WC di wisata taman pelangi, ”* (Maksum, 2020).

Dari apa yang dijelaskan informan, untuk kegiatan daya lingkungan BKM Citra Dharma Mulya melakukan kegiatan pelebaran jalan dan rapat dengan sesama anggota BKM terkait kegiatan lingkungan. Dari kegiatan yang dilakukan oleh anggota BKM Citra Dharma Mulya ini sesuai dengan tujuan kegiatan lingkungan yang terdapat dalam pedoman teknis kegiatan Tridaya yaitu memajukan kualitas kelembagaan masyarakat dalam melakukan upaya guna mengembangkan lingkungan sekitar dan pemukiman.

3. Sosial

Ilmu dan juga keterampilan merupakan faktor naiknya taraf hidup suatu masyarakat. Pemberdayaan dengan basis pembinaan dan pendidikan keterampilan mutlak perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan ayat QS Al-Mujadilah 58/11:

..... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:.....”niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantara kamu dan oerang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mehateliti apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadilah ayat 11).

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh BKM untuk mengembangkan sumber daya masyarakat melalui kegiatan ketrampilan kerja. Ini merupakan salah satu usaha untuk menjawab permasalahan kurangnya pengetahuan dan pengelolaan usaha yang baik pada kelompok sasaran. Beberapa upaya

peningkatan ketrampilan kerja yang dilakukan oleh BKM Citra Dharma Mulya di antaranya dilakukan dengan mengalokasikan dana untuk kegiatan pelatihan.

Kegiatan pelatihan kerja dianggap sinergis dengan kegiatan pemberian pinjaman modal melalui dana bergulir. Penguatan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman modal saja tidak cukup, perlu adanya peningkatan kualitas SDM agar modal yang telah dipinjamkan dapat berkembang atau dengan modal tersebut masyarakat dapat membuka usaha baru. Di Desa Trimulyo, kegiatan pelatihan kerja ini juga ditangani oleh BKM Citra Dharma Mulya sebagai tindak lanjut dari program dana bergulir. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator BKM :

Kita dulu ada kegiatan pelatihan, semisal masyarakat sudah pinjam dana untuk buka usaha tapi belum ada kemampuan. Maka kita usahakan ada pelatihan. Atau jika udah dapat pelatihan terus mau minjem dana buat praktekin pelatihan juga bisa, tapi saat ini pelatihan belum ada lagi, mbak,” (Maksum, 2020).

Pelatihan kerja ini diharapkan mampu menggali potensi yang ada di sekitarnya, dan selanjutnya dapat dikembangkan sebagai usaha produktif. Pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan ketrampilan ini juga didukung berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota BKM, *“Lumayan banyak pelatihan mba, pelatian buat UPK, pelatihan untuk masyarakat juga ada. sementara ini peltihan-pelatihan diberhentikan dulu, jika nanti suasana sudan lebih baik dan kalo ada yang minta bisa berjalan lagi,”* (Sunarsih, 2020).

Informasi di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun ini, belum ada pelatihan kerja yang terealisasi. Hal ini dikarenakan situasi saat ini yang masih belum memungkinkan dan juga partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini masih kurang, sehingga realisasi program berjalan cukup lambat. Walaupun kegiatan pelatihan ketrampilan ini pada awalnya digunakan sebagai sarana untuk peningkatan ketrampilan namun di kalangan masyarakat sasaran tujuan ini belumlah tercapai secara optimal.

Berdasarkan penjelasan mengenai pemberdayaan sosial dalam rangka meningkatkan sumber daya masyarakat melalui kegiatan ketrampilan kerja, menunjukkan peran BKM Citra Dharma Mulya dalam menangani kegiatan

pelatihan usaha tersebut terkesan belum maksimal. Kemanfaatan dari kegiatan yang dilakukan BKM Citra Dharma Mulya masih perlu dioptimalkan. Selain itu proses pendampingan dari BKM masih belum bisa berjalan secara berkelanjutan, BKM perlu melakukan pembinaan dan bimbingan secara pelan-pelan, namun pasti sampai akhirnya masyarakat yang ikut pelatihan benar-benar bisa mandiri. Keberlanjutan kegiatan harus menjadi perhatian bagi BKM Citra Dharma Mulya, terutama apakah kegiatan tersebut disertai dengan upaya meningkatkan ketrampilan yang telah diperoleh melalui pelatihan ketrampilan yang diadakan.

E. Mengawasi Proses Pelaksanaan BLM

Kegiatan yang dilakukan BKM Citra Dharma Mulya dalam mengawasi proses pelaksanaan BLM adalah dengan cara (mengawasi) kegiatan secara langsung ke lokasi kegiatan yang sedang dilakukan dan melalui RAK yang dilakukan di balai desa sebagai usaha dari evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh BKM Citra Dharma Mulya. Kegiatan mengawasi proses pelaksanaan BLM untuk kegiatan lingkungan tidak terbatas pada kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga dilakukan koordinasi dan evaluasi yang dikemas kedalam sebuah forum masyarakat yang santai di pandu oleh BKM Citra Dharma Mulya dan dihadiri KSM dan masyarakat serta fasilitator. Proses BLM tidak terbatas pada kegiatan lingkungan saja, namun juga berlaku kegiatan ekonomi dan sosial.

Dalam kegiatan pengawasan proses BLM ini, BKM Citra Dharma menjalankan prinsip *Quality control* yaitu sebuah proses pengawasan dimana proses ini menjamin bahwasanya produk- produk kegiatan yang telah dibuat serta dibentuk telah memenuhi standar. Diperlukan kegiatan *monitoring* yang terus menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan guna menjamin bahwasannya pelayanan yang dilakukan memiliki mutu yang dapat dipertanggung jawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, dalam pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan disebutkan beberapa peran ideal BKM, yakni (1) Mengerahkan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana masalah kemiskinan, (2) Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal yang terkait pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, (3) Memperkenalkan serta menegakkan nilai-nilai luhur dalam setiap keputusan, (4) Membangkitkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin, (5) Memperluas jaringan Badan Keswadayaan Masyarakat, dan 6). Melakukan pengawasan terhadap proses pemanfaatan BLM.

Kedua, peran normatif BKM Citra Dharma Mulya dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Trimulyo, Jetis, Bantul adalah sebagai berikut: (1). Perencanaan Kerja BKM Citra Dharma Mulya, (2). Program Kerja Kesekretariatan, (3). Program Khusus BKM Citra Dharma Mulya, dan (4). Program Kerja UPK, Program Kerja UPL, dan Program Kerja UPS.

Ketiga, beberapa kegiatan yang dihasilkan oleh adanya peran BKM Citra Dharma Mulya adalah sebagai berikut: (1). Mengorganisasikan masyarakat secara partisipatif: pengorganisasian masyarakat dalam perencanaan partisipatif, (2). Membuat dewan pengambilan keputusan, (3). Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur, (4). Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin, dan (5). Mengawasi Proses Pelaksanaan BLM.

REFERENSI

- Al Fatih, Andy. (2010). *Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press.
- Arikunto, Suharsini. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bhinadi, Ardito. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Study Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bahri, Efri Syamsul. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri: Tim FAM Publishing.
- Daruwinata, RD. Dkk. (tt). "Peran LPMK dan BKM dalam pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tambalang", dalam <http://www.fisip.undip.ac.id>.

- Departemen Pekerjaan Umum. (2007). *Modul Khusus Komunitas UP*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- E, Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Reflika Aditama.
- Hardani (dkk). (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup.
- <http://kotaku.pu.go.id/>
- <https://bkmhidupsejahtera.wordpress.com>.
- <https://trimulyo.bantulkab.go.id/triibunnews.com>
- Ishak, Andi Evi Desiana. (2018). “Peran BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian di Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Goa”. *Skripsi UIN Alaudin Makasar*.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2012). *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Jakarta: Direktotat Jenderal Cipta Karya-Kementrian Pekerjaan Umum*.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugrahani, Farida. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* Solo: Cakra Books.
- Pratama, Arga Dwi. (2019). “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Kampung Wisata Tani di Kelurahan Temas Kota Batu”. *Skripsi*. Universitas Muhamadiyah Malang.
- Raco, Jozef. (2010). *Metode Peneitian Kualitatif*. Cikarang: Grasindo.
- RI, Departemen Agama. (2014). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: CV Darus Sunah.
- Rustanto, Bambang. (2015). *Menangani Kemiskina*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini. (2005). *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Suharto, Edi. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Soekanto, Soejono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

-
- Sopingi. (2019). “Analisis Pemberian Pinjaman Ekonomi Bergulir dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Ditinjau dari segi Ekonomi Islam”. *Skripsi*. UIN Walisongo: Semarang.
- Taufik H, Agus. (2015). “Analisis Efektifitas Program Pinjaman Dana Bergulir pada UPK PNPM Mandiri Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang”. *Jurnal Bisnis*, Vol.3. No 1. Juni.
- Utami, Ajeng Dini. (2019). *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.
- Widjajanti, Kesi. (2011). “Model Pemberdayaan Masyarakat”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12. No. 1. Juni.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Rian Nugroho Dwidjowijoto, RN. (2007). *Manajemen Pemberdayaan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.